

TESIS
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA ATAS
TANAH ASET DANA Pensiun SEMEN PADANG SEBAGAI
BARANG MILIK NEGARA

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



OLEH

SUBRIANTO
NIM 2320113033

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum. (Pembimbing I)
Dr. Yasniwati, S.H.,M.H. (Pembimbing II)

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA ATAS TANAH ASET DANA PENSIUN SEMEN PADANG SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA

**(Subrianto, NIM. 2320113033, 85 Halaman, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas 2025)**

ABSTRAK

Sertipikat merupakan tanda bukti hak kepemilikan tanah yang harus mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum, tetapi itu belum menjamin sepenuhnya tentang kepastian hukum pemilikinya karena masih memberikan kesempatan kepada pihak lain yang juga merasa memiliki tanah tersebut. Sertipikat didapatkan setelah dilaksanakan proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang meliputi pengukuran, pendaftaran hak dan pemberian surat tanda bukti hak yaitu sertipikat. Proses pendaftaran tanah ini yang menimbulkan berbagai macam permasalahan atau kasus pertanahan yang salah satunya yaitu terbitnya 2 (dua) sertipikat atas satu bidang tanah yang dikenal dengan sertipikat ganda. Sengketa sertipikat ganda ini dialami oleh dana pensiun semen padang yang merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Semen Padang sebagai anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga aset dana pensiun ini dapat dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) mengapa terjadi sertipikat ganda atas tanah aset Dana Pensiun Semen Padang (2) bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat ganda atas tanah aset Dana Pensiun Semen Padang sebagai barang milik negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini kemudian didapatkan kesimpulan yaitu hal yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda dalam satu bidang tanah yang sama karena kesalahan penunjukan objek dan penyelesaian sengketa sertipikat tanah ganda dapat dilakukan upaya perlindungan hukum yang berbentuk represif dan dapat juga dilakukan dengan jalan musyawarah serta penyelesaian melalui jalur peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan umum.

Kata kunci: sertipikat tanah ganda, barang milik negara, penyelesaian sengketa

**SETTLEMENT OF DISPUTE OVER DUAL CERTIFICATES FOR LAND
ASSETS OF THE SEMEN PADANG PENSION FUND AS STATE
PROPERTY**

(Subrianto, NIM. 2320113033, 85 pages, Program Studi Magister of Law,
Fakulty of Law Andalas University 2025)

ABSTRACT

A certificate is proof of land ownership rights that must have legal force and certainty, but it does not fully guarantee the legal certainty of the owner because it still provides an opportunity for other parties who also feel they own the land. Land certificates are obtained after the land registration process carried out by the government, in this case the National Land Agency (BPN), which includes measurement, registration of rights, and the issuance of proof of rights, namely the certificate. This land registration process gives rise to various problems or land cases, one of which is the issuance of two certificates for a single plot of land, known as a duplicate certificate. This dual certificate dispute was experienced by the Semen Padang Pension Fund, which is a legal entity established by PT Semen Padang as a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN), so that the assets of this pension fund can be categorized as State Property (BMN). The formulation of the problem in this study is (1) why did the dual certificate occur for the land assets of the Semen Padang Pension Fund (2) how to resolve the dual certificate dispute for the land assets of the Semen Padang Pension Fund as state property. The method used in this research is an empirical legal approach, also known as field research. The data sources used are primary and secondary data sources. This research then concluded that the cause of the emergence of duplicate certificates in the same plot of land is due to errors in designating the object and the resolution of disputes over duplicate land certificates can be done through legal protection efforts in the form of repression and can also be done through deliberation and resolution through the State Administrative Court or general court.

Keywords: double land certificates, state property, dispute resolution